



LAPORAN MEDIA CETAK

**Pj. Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M
(20 Januari 2025)**

Summary

| Media | News | Positive | Neutral | Negative |
|-------|------|----------|---------|----------|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |

Daily Statistic

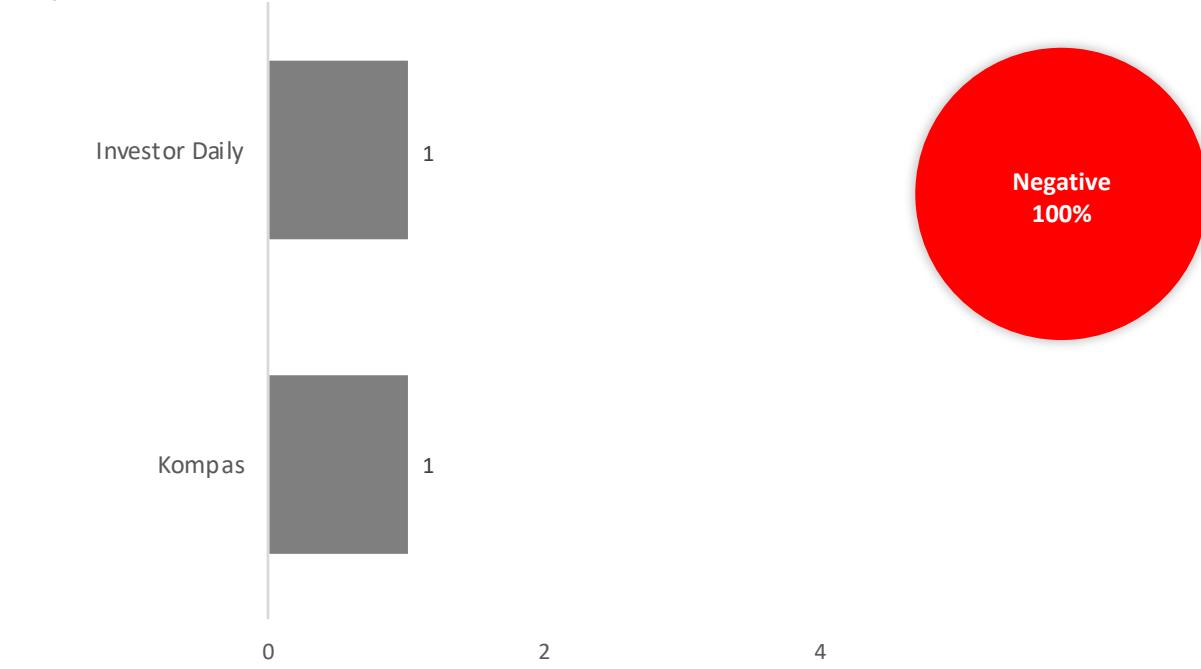


Table Of Contents : 20 Januari 2025

| No | Date | Media | News Title | Page | Sentiment | Influencers |
|----|-----------------|----------------|--|------|-----------|------------------|
| 1 | 20 Januari 2025 | Kompas | Wabah PMK akibat Longgarnya Kebijakan | 6 | Negative | |
| 2 | 20 Januari 2025 | Investor Daily | Petani Berharap Rafaksi Harga Gabah Ditiadakan | 10 | Negative | Yadi Sofyan Noor |

| | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------|
| Title | Wabah PMK akibat Longgarnya Kebijakan | | |
| Media | Kompas | Reporter | Rochadi Tawaf |
| Date | 2025-01-20 | Tone | Negative |
| Page | 6 | PR Value | |
| Summary | <p>Pasca-epidemi PMK tahun 2022, pada akhir Desember 2024, PMK kembali mewabah. Wabah PMK kali ini dimulai di Jawa Timur, kemudian merebak ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, sebagian Sumatera (Lampung), Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Saat ini, wabah ini sudah meluas di 11 provinsi, 84 kabupaten/kota, 678 kecamatan, dan 1.834 desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wabah PMK yang kedua kalinya pada akhir Desember 2024 ini merupakan indikator kegagalan kegiatan preventif, berupa vaksinasi dan biosecuriti yang dilakukan pada tahun 2023-2024. Berdasarkan pengamatan, ternyata vaksinasi tidak dilakukan secara berkala. Faktor penyebab utamanya antara lain tidak tersedianya dana tanggap darurat. Kelangkaan vaksin dan mitigasi (pelaksanaan biosecuriti) oleh peternak juga turut memberikan andil terhadap kembalinya mewabahnya PMK. | | |

Wabah PMK akibat Longgarnya Kebijakan

Rochadi Tawaf

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia

Tahun 1806, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, untuk pertama kalinya didatangkan bangsa sapi Zebu oleh para pedagang dari India ke Jawa Timur. Tahun 1842 didatangkan pula bangsa sapi Ongole oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk program Ongolisis di Pulau Sumba.

Empat puluh lima tahun kemudian, pada sekitar tahun 1887, untuk pertama kalinya terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Malang, kemudian tahun 1973 di Bali, dan tahun 1983 di Blora, Jawa Timur (Soedradjat, 2012).

Berdasarkan pengalaman itu, sejak wabah PMK tahun 1887, 1973, dan 1983, pemerintah terus berusaha melakukan berbagai upaya untuk membebaskan negeri ini dari wabah PMK. Pada 1986, pemerintah mendeklarasikan bahwa Indonesia telah bebas PMK.

Empat tahun kemudian, pada tahun 1990, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) menyatakan bahwa Indonesia telah bebas PMK tanpa vaksinasi.

Wabah PMK 2024

Pasca-epidemi PMK tahun 2022, pada akhir Desember 2024, PMK kembali mewabah. Wabah PMK kali ini dimulai di Jawa Timur, kemudian merebak ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, sebagian Sumatera (Lampung), NTB, dan Bali. Saat ini, wabah ini sudah meluas di 11 provinsi, 84 kabupaten/kota, 678 kecamatan, dan 1.834 desa.

Berdasarkan informasi dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), wilayah berjangkitnya PMK saat ini dibagi ke dalam tiga zona: (1) Jawa, Bali, NTB, dan sebagian Sumatera (Lampung) sebagai zona pemberantasan; (2) Sumatera (tanpa Lampung), Kalimantan, dan Sulawesi sebagai zona pengendalian; dan (3) NTT, Maluku, dan Papua, sebagai zona pencegahan (bebas

PMK).

Namun, wabah PMK yang kedua kalinya pada akhir Desember 2024 ini merupakan indikator kegagalan kegiatan preventif, berupa vaksinasi dan biosecuriti yang dilakukan pada tahun 2023-2024.

Berdasarkan pengamatan, ternyata vaksinasi tidak dilakukan secara berkala. Faktor penyebab utamanya antara lain tidak tersedianya dana tanggap darurat. Kelangkaan vaksin dan mitigasi (pelaksanaan biosecuriti) oleh peternak juga turut memberikan andil terhadap kembalinya mewabahnya PMK.

Dampak kebijakan

Indonesia sebagai negara impor neto daging sapi memiliki daya tarik bagi para importir daging. Hal ini terbukti dari maraknya impor daging fleisk pada era 1990-an, dengan modal penyulaman daging sapi bekas asal India dari Sarawak, Malaysia, melalui Pontianak Kalimantan Barat. Kala itu, India belum dinatakan sebagai negara yang bebas dari PMK.

Pada akhir 1990-an punya ijin wacana untuk membuat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) karena dirasakan UU tersebut harus mengikuti perkembangan zaman.

Meski demikian, upaya mengubah UU ini memerlukan waktu panjang sekitar sepuluh tahun. Baru pada 2009 terkena tunduk UU No 18/2009 tentang PKH. Salah satu materi (frasa) dalam UU ini yang tidak disopakati dan perlu diubah adalah kebijakan importasi produk hal yang belum bebas PMK karena harganya relatif murah.

Pada akhirnya, putusan MK bersifat "principal dan nirkonkret", yang artinya putusan tersebut langsung memperbolehkan keleluasaan tetap sejauh dicukupan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat diambil (Enny Nurbaningsih, 2024).

Berkenaan dengan hal ini, lagi-lagi peternak yang didukung para mantan dirjen PKH melakukan uji materi ke MK untuk kedua kalinya. Namun, dengan penetapan keputusan MK No 129/PJU-XIII/2015, MK menolak uji materi kelompok peternak dan membolehkan dilakukan impor produk peternakan dari zona wilayah negara yang belum bebas PMK.

Turunan dari kebijakan ini, pemerintah telah membuat ke-

liuan-Rp 20 triliun.

Dalam rangka mengembalikan kondisi negara menjadi kembali bebas dari PMK, langkah pertama dan utama yang perlu dilakukan adalah harmonisasi kebijakan mengenai penyekatan hewan menuju strategis (PHMS) dan sistem kesehatan hewan nasional yang dilengkapi dengan kebijakan dana tanggap daruratnya.

Harmonisasi ini harus segera dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya diterima ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Harga bukan persoalan asal kami senang...
Gen Z "bingits", ya.

*

Pembongkaran pagar laut selesai paling cepat 10 hari.

*Gaduhnya, sih,
berhari-hari.*

*

"Jokes" bapak-bapak
ala hakim MK.
*Hakim juga manusia,
punya rasa, punya tawa.*

mang Unil

